LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN III TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunandaerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sampai Triwulan III melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Program, Kegiatan, dan SubKegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkanpencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
4. Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/263/K/411.013/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

3. BAB. III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
4. BAB. IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerjayang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakankriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah

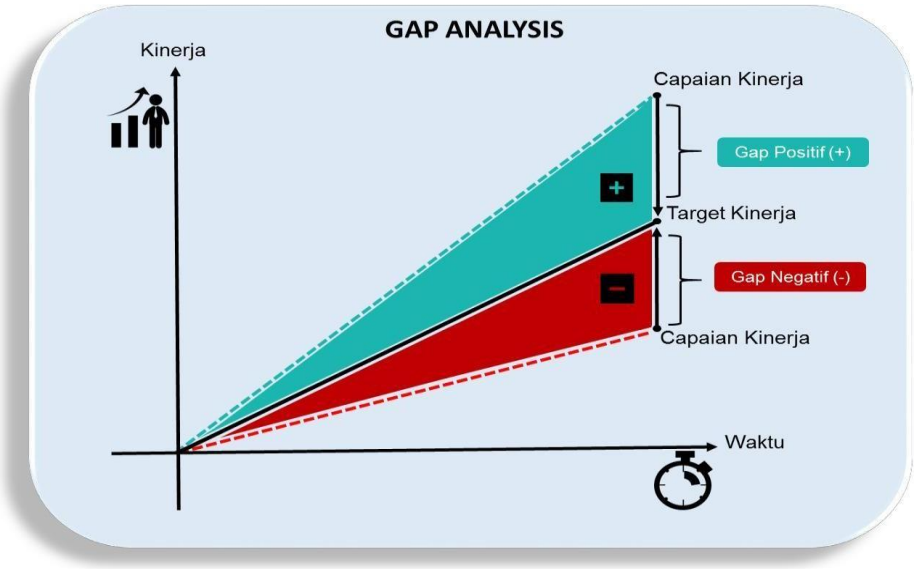
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telahmemenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkanantara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupunnegatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

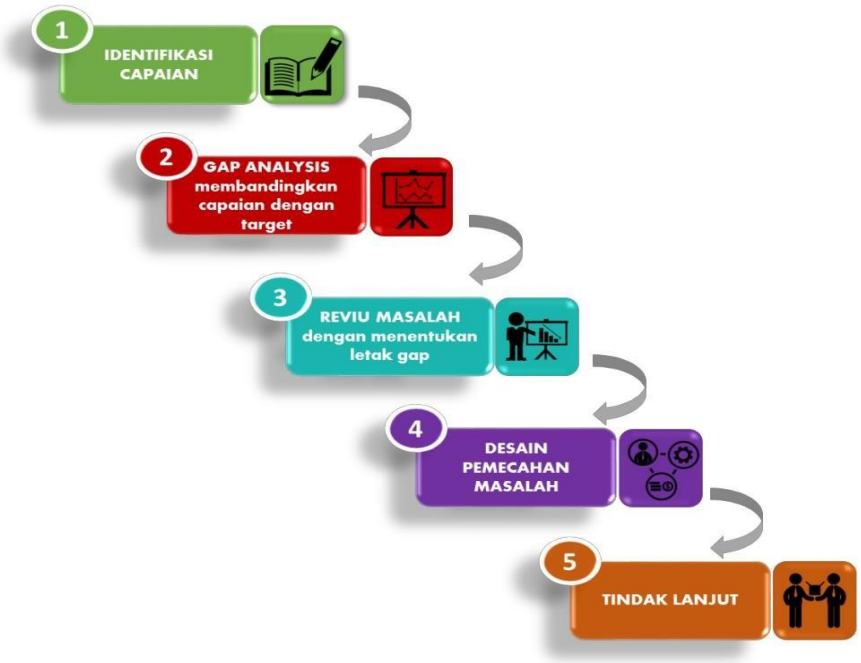
Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.

2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangn tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasiRenja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tujuan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Indeks Desa	0,7810	0	0
	Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa	2. Tingkat Status Perkembangan Desa	45,5%	0%	0%

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Pencapaian status Persentase Desa Mandiri.

Kegiatan pemutakhiran ID di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2025 belum ada realisasi.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Hasil Survei Kepuasan Masyarakat***	**80**	**6.227.402.191**	**83,61**	**3.922.028.574**	***104,5%***	***62,98%***
1.1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu**	**14 Dokumen**	**39.307.200**	**10 Dokumen**	**38.294.250**	71,42%	***97,42%***
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14 Laporan	39.307.200	10 Laporan	38.294.250	71,42%	***97,42%***
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu**	**105 Dokumen**	**5.147.201.059**	**33 Dokumen**	**3.230.502.268**	**91,43%**	**62,76%**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	5.134.488.059	93 Orang/12 bln	3.218.019.268	**300%**	**62,67%**
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	2 Laporan	5.691.000	2 Laporan	5.593.000	**100%**	**98,28%**

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuang Bulan/ Triwulanan/ semesteran SKPD	72 Laporan	7.022.000	49 Laporan	6.890.000	**68,05%**	**98,12 %**
1.3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Kehadiran ASN**	0	-				
1.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai						
1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta adtribut Kelengkapannya						
1.4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**3.612 Dokumen**	**379.620.800**	**2.697 Dokumen**	**206.586.765**	**74,67%**	***54,42%***
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponeninstalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan	1 Paket	9.998.900	1 Paket	9.923.000	100 %	***99,24%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang disediakan	8 Paket	57.975.400	6 Paket	38.083.706	75%	***65,69%***
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	2 Paket	2.152.500	2 paket	1.972.000	100%	***91,61%***
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12 Dokumen	3.000.000	9 Dokumen	1.440.000	75%	***48%***
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	550 Laporan	277.928.000	278 Laporan	140.352.600	50,54%	***50,50%***
1.4.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penata usahan arsip dinamis pada SKPD	3.000 Dokumen	28.566.000	2.401 Dokumen	14.815.459	80,03%	***51,86%***
1.5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Yang Tersedia Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4 unit**	**61.630.308**	**4 Unit**	**59.878.950**	**100 %**	***97,16%***
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatanyang di sediakan						
1.5.2	Pengadaan Kendaraan Operasional / Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ lapangan yang disediakan						

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.5.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yangdisediakan	0 unit	0	0 Unit	0	0%	*0%*
1.5.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yangdi sediakan	4 Unit	61.630.308	4 Unit	59.878.950	100%	***97,16%***
1.6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat**	**50 Laporan**	**88.276.000**	**20 Laporan**	**54.199.906**	40%	***61,40%***
1.6.1	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	2 Laporan	26.276.000	2 Laporan	17.073.862	100%	***64,98%***
1.6.2	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 laporan	62.000.000	18 laporan	37.126.044	75%	***59,88%***
1.7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Yang Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi**	**69 Unit**	**511.366.824**	**58 Unit**	**332.566.435**	**73,91%**	**65,03%**
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara yang dibayarkan	7 Unit	295.862.443	6 Unit	182.817.019	85,71%	***61,79%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	20 Unit	3.302.754	20 Unit	3.270.750	100%	***99,03%***
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	38.850.000	30 Unit	26.105.000	75%	67,19%
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan banguan gedung kantor lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	2 Unit	173.351.627	2 Unit	120.373.666	100%	***69,44%***
2.	***PROGRAM PENATAAN DESA***	***Persentase Desa Yang Mendapatkan FasilitasiPenataan Desa***	**24%**	**63.964.100**	**11,4 %**	**440.000**	47,5%	***0,69%***
2.1	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa**	**66 Desa**	**63.964.100**	**27 Desa**	**440.000**	40,90%	***0,69%***
2.1.1	Pembentukan Penghapusan ,Penggabungan dan Perubahan Status	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	10 Desa	11.017.650	0 Desa	10.905.800	0,00%	***98,98%***
2.1.2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10 Desa	30.685.000	0 Desa	12.124.800	0,00%	***39,51%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
2.1.3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	26 Desa	7.779.200	27 Desa	5.884.800	103,85%	***75,65%***
2.1.4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penamaandan Kode Desa						
2.1.5	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat ,Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota						
2.1.6	Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa	Jumlah sarana dan Pra Sarana Desa	20 Unit	14.482.250	0 Unit	4.925.000	0,00%	***34%***
3.	***PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA***	***Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan***	**87%**	**121.864.950**	**24%**	**32.398.884**	**9,19%**	***26,59%***
3.1.	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan**	**230 Desa**	**121.864.950**	**45 Desa**	**32.398.884**	**9,19%**	***26,59%***
3.1.1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa	10 Dokumen	84.693.850	10 Dokumen	55.116.508	100%	***65,08%***
3.1.2	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kerja sama antarDesa dengan pihak Ketiga	15 Dokumen	5.047.750	9 Dokumen	3.955.800	60%	***78,37%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
3.1.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	32.123.350	1 Dokumen	16.073.852	50%	***50,03%***
4.	***PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA***	***Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa***	**100%**	**3.318.503.825**	**0%**	**607.667.840**	**38,00%**	***44,18%***
4.1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**100%**	**3.318.503.825**	**0%**	**607.667.840**	**38,00%**	***44,18%***
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	4 Dokumen	8.201.900	0 Dokumen	4.276.900	0,00 %	***52,14%***
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	528 Dokumen	59.168.500	264 Dokumen	5.000.000	50%	***8,45%***
4.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	264 Dokumen	25.273.500	0 Dokumen	2.500.000	100%	***9,89%***
4.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan KeuanganDesa	264 Dokumen	2.907.391.775	196 Dokumen	2.435.580.142	74,24%	***83,77%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
4.1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	8.400.500	100 Orang	1.950.000	100%	***23,21%***
4.1.6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa	80 Dokumen	39.704.750	0 Dokumen	33.857.500	0,00%	***85,27%***
4.1.7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Jumlah Laporan hasil Penyelengggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	167.358.500	0 Laporan	55.580.600	0,00%	***33,20%***
4.1.8	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	7.279.400	0 Laporan	5.891.000	0,00%	***80,93%***
4.1.9	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen ProfilDesa	264 Dokumen	9.056.000	0 Dokumen	5.106.000	0,00%	***56,38%***
4.1.10	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Aset Desa	264 Dokumen	29.362.200	0 Dokumen	20.821.000	0,00%	***70,91%***
4.1.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Kapasitas	100 Orang	6.078.800	0 orang	975.000	0,00 %	***16,03%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
4.1.12	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan HasilPembinaan Laporan Kepala Desa	2 Laporan	7.618.000	2 Laporan	7.568.000	100%	***99,34%***
4.1.13	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembanganDesa serta lomba Desa	21 Dokumen	43.610.000	0 Dokumen	8.200.000	0,00%	***18,80%***
5	***PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT***	***Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan***	**45%**	**614.644.600**	**0%**	**334.720.228**	**0,00 %**	***54,46%***
5.1.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan**	**118 Desa**	**614.644.600**	**41 Desa**	**334.720.228**	**34,74 %**	***54,46%***
5.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa danmasyarakat Hukum adat	300 Dokumen	76.049.450	153 Dokumen	51.097.500	51%	***67,19%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
5.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	384 Lembaga	64.214.150	234 Lembaga	34.255.000	60,94%	***53,34%***
5.1.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekomoni Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatana Asli Desa	2 Dokumen	14.842.800	0 Dokumen	1.607.000	0,00%	***10,83%***
5.1.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemenfataan teknologi Tepat Guna	2 Laporan	62.784.000	1 Laporan	46.384.000	50%	***73,88%***
5.1.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan hasil fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	29.102.700	0 Laporan	18.563.000	0,00%	***63,78%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
5.1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteran Keluarga PKK	110 Dokumen	367.651.500	84 Dokumen	182.813.728	**76,36%**	***49,72%***
				10.346.379.666		**6.953.041.504**	**72,46%**	**67,20 %**

1. **Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025**

❖ ***Dalam Pelaksanaan Program, Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Keluaran sebagai berikut :***

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi berupa jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
3. Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD.
4. Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.
5. Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan.
6. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.
7. Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan.
8. Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD.
9. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
10. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan.
11. Jumlah Laporan penyediaan jasa Surat Menyurat.
12. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.
13. Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
14. Jumlah Mebel yang di pelihara
15. Jumlah Peralatan Mesin yang di pelihara
16. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Gedung yang dipelihara/di rehabilitasi.

- ***Dalam pelaksanaan Program Penataan Desa telah direalisasi keluaran yaitu data desa yang mendapatkan fasilitasi penataan desa***

  - Realisasi keluaran Program Penataan desa didukung keluaran dari kegiatanpenyelenggaraan penataan desa berupa : data desa yang mendapatkan fasilitasi di bidang penataan desa yang didukung oleh sub kegiatan :
    1. Fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa dengan keluaran : Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa dengan melakukan updating data Indeks Desa (Desa Mandiri, maju dan berkembang).
    2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan keluaran : Jumlah desa yang melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai Permendagri 45 tahun 2016.
    3. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dengan keluaran Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan kewenangan desa.
    4. Fasilitasi Sarana Prasarana Desa dengan keluaran : Jumlah Unit Sarana Prasarana Desa hasil fasilitasi.

- ***Dalam pelaksanaan Program Kerja sama Desa telah direalisasi keluaranyaitu data desa yang mendapatkan fasilitasi kerjasama desa***

  - Realisasi keluaran Program Kerjasama Desa didukung keluaran dari kegiatan penyelenggaraan kerjasama desa berupa : data desa yang mendapatkan fasilitasi di Kerjasama desa yang didukung oleh sub kegiatan :
    1. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam kabupaten/kota dengan keluaran : jumlah dokumen hasil fasilitasi fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota.

2. Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dengan keluaran : jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga.
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan keluaran : Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan.

❖ ***Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa***

Analisis Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025

- Analisis Capaian Kinerja dalam pelaksanaan program administrasi pemerintahan desa Indikator keluaran adalah jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi tata kelola Administrasi Pemerintahan Desa.
- Realisasi keluaran program administrasi pemerintahan desa didukung keluaran dari kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa berupa desa yang mendapatkan fasilitasi tata kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
  2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa.
  3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
  4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas.

5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan keluaran Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
7. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa Yang Tersusun.
8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan keluaran : Jumlah Anggota BPD Yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas.
9. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa dengan keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa.
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

❖ ***Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Keuangan Aset dan Ekonomi Desa***

- Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Bidang Keuangan, Aset, dan Ekonomi Desa

  Pada Triwulan III Tahun 2025, pada Triwulan Ketiga Tahun Anggaran 2025 berfokus pada Siklus Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta pelaksanaan Fasilitasi Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

- Realisasi Program Administrasi Pemerintahan Desa

  Walaupun ada beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang belum pasti dalam implementasinya dikarenakan regulasi yang belum siap. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan kepada desa di kabupaten Nganjuk. Hal ini diimplementasikan pada 3 Subkegiatan, antara lain:

  1. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

     Tugas dan fungsi pembinaan pada subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa diimplementasikan dengan melaksanakan bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Desa kepada 264 Sekretaris Desa di Kabupaten Nganjuk.

     Realisasi Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa adalah:

     Penyaluran Dana Desa Tahap I: tersalur ke 263 Desa

     Penyaluran Dana Desa Tahap II: tersalur ke 223 Desa

     Penyaluran Alokasi Dana Desa I : tersalur ke 264 Desa

     Penyaluran Alokasi Dana Desa II : tersalur ke 248 Desa

  2. Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa

     Wujud kerja sebagai upaya mencapai target kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa yang telah ditetapkan, Bidang Keuangan, Aset, dan Ekonomi Desa telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

     Fasilitasi penganggaran Modal Penyertaan BUM Desa dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

3. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Pada fasilitasi pengelolaan aset desa, difokuskan pada penyusunan draf Peraturan Bupati Nganjuk tentang Pengelolaan Aset Desa. Disamping kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah evaluasi implementasi SIPADES 3.0 yang sampai dengan 30 Juni 2025 sudah diimplementasikan oleh 225 desa di Kabupaten Nganjuk.

- ***Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat***.

  Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025 Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat data keluaran/output sebagai berikut:

  a. Fasilitasi penataan LKD dengan output pemenuhan legalitas LKD antara lain : posyandu (yang terdiri dari SK Tim pembina Posyandu Kabupaten, SK Tim pembina Posyandu Kecamatan, SK Tim pembina Posyandu Tk Desa, SK Posyandu (Kader dan pengurus), SK pemberian insentif Kader dan pengurus) dan SK KPM.
  b. Fasilitasi TP PKK Kabupaten nganjuk dengan output fasilitasi pertemuan anggota PKK, fasilitasi pertemuan pleno, fasilitasi pertemuan pengurus inti PKK, dan fasilitasi pelaksanaan dinas luar daerah dan dalam daerah.

II. Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

- **Analisis realisasi output Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :**

  1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi berupa jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan keluaran DPA dan Anggaran Kas

sudah dilaksanakan pada Tribulan I. Sedangkan DPPA dan Perubahan Anggaran Kas masih menunggu pengesahan dari Tim TAPD.

2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan keluaran 31 orang/bulan.
3. Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dengan keluaran : Laporan LRA, Fungsional, DTH, laporan e-bupot / e-cortex dan verifikasi BMD per bulan. Laporan semesteran keuangan sudah dilaporkan.
4. Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
5. Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
6. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
7. Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
8. Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
9. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
10. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
11. Jumlah Laporan penyediaan jasa Surat Menyurat dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
12. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
13. Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan keluaran : sudah dilaksanakan.

14. Jumlah Mebel yang di pelihara dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
15. Jumlah Peralatan Mesin yang di pelihara dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
16. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Gedung yang di pelihara/di rehabilitasi dengan keluaran : sudah dilaksanakan.

2. **Dalam pelaksanaan Program Penataan Desa telah direalisasi keluaran yaitu data Desa yang *mendapatkan fasilitasi penataan desa***

- Realisasi keluaran Program Program Penataan desa didukung keluaran dari kegiatan penyelenggaraan penataan desa berupa : data desa yang mendapatkan fasilitasi di bidang penataan desa yang didukung oleh sub kegiatan :

  1. Fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa dengan keluaran : Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa dengan melakukan updating data Indeks Desa (Desa Mandiri, maju dan berkembang).

     Pada Tribulan III ini belum bisa menampilkan hasil dikarenakan walaupun kegiatan updateting data Indeks Desa sudah selesai dilaksanakan pada Tribulan II namun Kementrian Desa PDTT belum mengeluarkan Berita Acara tentang Status Desa.

  2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan keluaran : data desa yang melaksanakan penetapan tata wilayah desa (Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai Permendagri 45 tahun 2016). Pada Tribulan III fasilitasi yang dilakukan adalah pendampingan pelaksanaan kesepakatan pemasangan pilar batas desa. Sedangkan untuk Verifikasi teknis dari Badan Informasi Geospasial dan verifikasi yuridis dari Kementrian Hukum dan Ham serta Kemendagri belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan

untuk pelaksanaan verifikasi teknis dan yuridis menunggu jadwal dan informasi dari Dinas PMD Prov Jawa Timur.

3. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dengan keluaran jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi kewenangan desa. Pada fasilitasi kewenangan desa dilaksanakan pada tribulan II, sehingga di Tribulan III ada hasil.
4. Fasilitasi Sarana Prasarana Desa dengan keluaran : Jumlah Unit Sarana Prasarana Desa hasil fasilitasi.Pada tribulan III fasilitasi sarana prasarana desa yang dilakukan adalah Fasilitasi BKK provinsi tahun 2025. Pada tribulan III ini pelaksanaan kegiatan fisik BKK Provinsi masih proses dan belum selesai

3. **Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kerja Sama Desa telah direalisasi keluaran yaitu dokumen hasil fasilitasi kerja sama desa**.

   - Realisasi keluaran Program Peningkatan Kerja Sama desa didukung keluaran dari kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa berupa : Dokumen hasil fasilitasi Kerjasama desa yang didukung oleh sub kegiatan :

     1. Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota dengan keluaran

        : dokumen hasil fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota ada 2 dokumen yang terdiri dari

        a. Dokumen Laporan Perkembangan Kegiatan Keuangan Bumdesma TW III
        b. Dokumen Laporan Badan Pengawas Bumdesma TW III

     2. Fasilitasi Kerjasama antar Desa Pihak Ketiga dengan keluaran : dokumen hasil fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga sebanyak 9 dokumen perjanjian kerjasama desa dengan pihak ketiga.

3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan keluaran :1 dokumen Hasil fasilitasi pembangunan Kawasan perdesaan.

4. Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa telah direalisasi keluaran yaitu
Bidang Bina Pemerintahan Desa.

- Realisasi Keluaran Progran Administrasi Pemerintahan Desa didukung keluaran dari kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa berupa Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa sebanyak 1 dokumen yaitu Rekapitulasi Laporan Administrasi Pemerintahan Desa, pada Tribulan III ini dalam Proses fasilitasi pembinaan dan pengawasan.
2. Fasilitasi Produk Hukum Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa sebanyak 528 dokumen dilaksanakan mulai pada tribulan II, III dan IV. Pada tribulan III telah dilaksanakan rapat koordinasi penyusunan perubahan APBDes Tahun 2025 dan fasilitasi evaluasi perubahan APBDes Tahun 2025. Realisasi keluaran sebanyak 264 Dokumen Perubahan APBDes Tahun 2025.
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yaitu sebanyak 264 Dokumen, Pada tribulan III telah dilaksanakan sosialisasi petunjuk teknis penyusunan RKP Desa Tahun 2026 dan Fasilitasi Evaluasi Perubahan RPJMDes.

4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas. Pada tribulan III telah dilaksanakan peningkatan kapasitas aparatur lewat SIBERMATA DESA.
5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa yaitu 1 Laporan, dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 8 tahun sehingga tahun ini belum dilakukan pemilihan kepala desa. Sub Kegiatan ini dipergunakan untuk penyusunan Raperda tentang Desa yang sampai dengan tribulan III ini pada proses pembahasan dengan Pansus III DPRD.
6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu 1 Laporan. Pada tribulan III

   dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi pemberhentian perangkat desa karena usia sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dilaksanakan fasilitasi pengajuan rekomendasi Bupati tentang pemberhentian perangkat desa usia 60 tahun.
7. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun yaitu sebanyak 264 dokumen. Sub kegiatan ini pada tribulan III telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi updating prodeskel.
8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD realisasi keluaran adalah Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas. Pada tribulan III telah dilaksanakan fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD Antar Waktu.

9. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa yaitu 2 Laporan. Sampai dengan tribulan III kepala Desa yang telah menyusun Laporan pertanggungjawaban akhir tahun sebanyak 259 Desa atau 98,10 %.
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yaitu 21 Dokumen. Sampai dengan Tribulan III terus diadakan evaluasi dan monitoring perkembangan upditing Epdeskel.

5. Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa telahdirealisasi keluaran yaitu
Bidang Keuangan Aset dan Ekonomi Desa

Adapun target keluaran yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa:

1. Fasilitasi penyaluran dana Transfer desa kepada 264 desa
2. Bimtek pengelolaan keuangan desa kepada 264 desa
3. Bimbingan Teknis Peningkatan Pemberdayaan BUM Desa BUM Desa kepada 80 Direktur BUM Desa.
4. Fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa.
5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa kepada 100 Sekretaris Desa.

6. Realisasi keluaran Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dimaksud didukung keluaran dari kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa : data desa yang Kelembagaannya

diberdayakan melalui peningkatan kapasitas. Didukung oleh sub kegiatan :

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan MasyarakatHukum Adat dengan keluaran : 101 Dokumen.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan keluaran : 0 lembaga
3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan keluaran : 0 Dokumen
4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan keluaran : 0 Laporan
5. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan keluaran : 0 laporan.
6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan keluaran : 42 dokumen.

III Analisis realisasi keuangan Perangkat Daerah Tahun 2025

- **Realisasi Keuangan pada Program Dinas PMD Tahun 2025**

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi berupa jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan keluaran DPA dan Anggaran Kas sudah dilaksanakan pada Tribulan I. Sedangkan DPPA dan Perubahan Anggaran Kas masih menunggu pengesahan dari Tim TAPD.

2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN keluaran 31 orang/bulan dengan realisasi Rp. 968.516.965,-
3. Jumlah Laporan Akhir SKPD dengan realiasi Rp. 4.873.000,-
4. Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dengan realiasi Rp. 720.000,-
5. Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 2.025.000,-.
6. Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 10.391.955.
7. Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 540.000.-
8. Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 115.665.100,-
9. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 2.150.000,-
10. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 29.875.650,-
11. Jumlah Laporan penyediaan jasa Surat Menyurat sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 6.168.404,-
12. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 12.181.444,-
13. Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 79.105.894,-
14. Jumlah Peralatan Mesin yang di pelihara sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 9.260.000,-
15. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Gedung yang dipelihara/di rehabilitasi sudah dilaksanakan dengan realisasi Rp. 13.436.800,-

❖ Realisasi keuangan Program Penataan Desa pada Tribulan III Tahun 2025 sebesar **: Rp. 33.400.400,-**

1. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa sebesar Rp. 10.905.800,-
2. Kegiatan fasilitasi kewenangan desa Rp. 5.884.800,-
3. Kegiatan fasilitasi sarpras desa Rp. 4.925.000,-
4. Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa Rp. 11.684.800,-

❖ Realisasi keuangan Program Peningkatan Kerja Sama Desa dan Tahun 2025

a. Kegiatan fasilitasi Kerjasama Desa antar desa dalam kabupaten/ kota pada tribulan III sudah dilaksanakan dan sudah terealisasi sebesar Rp. 20.817.876,-
b. Kegiatan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga baru dilaksanakan pada tribulan III sesuai anggaran kas dan rencana aksi kegiatan Penataan Desa Rp. 3.955.800,-
c. Kegiatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan pada tribulan III sudah terealisasi sebesar Rp. 5.918.400,-

a. Analisis Realisasi Keuangan Perangkat daerah tahun 2025

Realisasi Keuangan Program Administrasi Pemerintahan Desa pada Bidang Bina Pemerintahan Desa tahun 2025.

Realisasi Keuangan pada Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelengagaran Administrasi Pemerintah desa Pada Triwulan III didukung oleh sub kegiatan Sbb:

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 8.201.900,-. Sampai dengan tribulan III realisasi keuangan sebesar Rp. 4.276.900,- atau 52,14% dan dalam proses pengajuan.

2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 59.168.500,- Pada tribulan III realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- atau 8,45% dan dalam proses pengajuan.
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Anggaran sebesar Rp. 25.273.500,- realisasi keuangan pada Tribulan III sebesar Rp. 2.500.000,- atau 9,89% dan dalam proses pengajuan.
4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 8.400.500,- Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini di Tribulan III sebesar Rp. 975.000,- atau 23,21%
5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 167.358.500,- realisasi anggaran pada sub kegiatan ini di Tribulan III sebesar Rp. 47.832.500,- atau 8,14% dan dalam proses pengajuan.
6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan anggaran Rp. 7.279.400,- realisasi anggaran pada sub kegiatan ini di Tribulan III sebesar Rp. 4.191.000,- atau 80,92%
7. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan anggaran sebesar Rp. 9.056.000,- realisasi anggaran pada sub kegiatan ini di Tribulan III sebesar Rp. 5.106.000,- atau 56,38% dan dalam proses pengajuan.
8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan anggaran sebesar Rp. 6.078.800,- realisasi anggaran pada sub kegiatan ini di Tribulan III sebesar Rp. 975.000,- atau 16,03%.
9. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 7.618.000,- realisasi anggaran pada sub kegiatan ini di tribulan III sebesar Rp. 3.700.000,- atau 99,34%
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 43.610.000,- realisasi anggaran pada sub kegiatan ini di tribulan III sebesar Rp. 8.200.000,- atau 18,80%

- **Realisasi Keuangan Program Keuangan Aset dan Ekonomi Desa**

  Adapun target keluaran sampai akhir tahun 2025 dan sedang proses penyusunan padaTriwulan III adalah sebagai berikut:

  1. Fasilitasi penyaluran dana Transfer desa kepada 264 desa sudah tersalurkan ke 263 desa.
  2. Bimtek pengelolaan keuangan desa kepada 264 desa sudah terlaksana.
  3. Bimbingan Teknis Peningkatan Pemberdayaan BUM Desa BUM Desa telah terlaksana kepada 80 Direktur BUM Desa.
  4. Fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa kepada 15 Desa.
  5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa yang telah terlaksana kepada 100 Sekretaris Desa.

- **Realisasi keuangan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**, **Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Tahun 2025**

  1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Anggaran sebesar Rp. **76.049.450,-** realisasi keuangan sebesar Rp. **35.450.000,-** atau **20.57**%
  2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Anggaran sebesar Rp. **64.214.150,-** realisasi keuangan sebesar realisasi keuangan sebesar Rp. **575.000**,- atau **52.45**%
  3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Anggaran sebesar Rp. **14.842.800,-** realisasi keuangan sebesar Rp. **900.000**,- atau **4.76**%.

4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Anggaran sebesar Rp. **62.784.000**,- realisasi keuangan sebesar Rp. **0,-** atau **73.88**%.
5. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Anggaran sebesar Rp. **29.102.700**,- realisasi keuangan sebesar Rp. **6.000.000**,- atau **43.17%**
6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Anggaran Sebesar Rp. **367.651.500,-** realisasi keuangan sebesar Rp. **83.604.324,-** atau **25.12%**

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
1	Tujuan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dengan kegiatan Pemutakhiran Data Desa bersumber dari Data Profil Desa	Masih Banyaknya jumlah Desa dengan status indeks Desa Membangun dalam katagori berkembang dan Maju
2	Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Desa	Adanya Program peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD dan Desa baik dari Kementerian dan Dinas PMD Provinsi Jatim.	Tenaga Pendamping Desa belum memiliki kemampuan yang merata dalam pendampingan dan belum sesuai harapan.
3		Regulasi tentang Desa semakin lengkap.	Masih adanya regulasi yang tumpang tindih.
4		Adanya kegiatan evaluasi dan perlombaan yang memacu semangat dan motivasi.	Kemampuan SDM dalam memahami regulasi yang berlaku secara menyeluruh.
5		Kebijakan ekonomi yang berpihak pada urusan pemberdayaan masyarakat.	Kondisi keberdayaan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang masih rendah/ lemah.
6		Tersedianya dukungan anggaran APBD untukurusan pemberdayaan masyarakat.	Kondisi keberdayaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat masih rendah.
7		Tersedianya sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk dikembangkan.	Terbatasnya kualitas sikap, nilai dan budaya gotong royong pada masyarakat untuk menuju kemandirian.

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
8		Potensi eksistensi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.	Terbatasnya motivasi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam (SDA).
9		Keterbukaan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat	Terbatasnya kemampuan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan dalam tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	**2**	**3**	**4**
1	**PROGRAM PENATAAN DESA**		
2	**Penyelenggaraan Penataan Desa**		
3	Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status	Telah dilakukannya kegiatan rutin update status desa secara berkala setiap tahun sehingga mudah untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan	Pada tahun 2025 ini Adanya peralihan dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) yang sebelumnya 3 indikator menjadi 6 indikator maka perlu sosialisasi dan pendampingan yang intensif kepada desa pada saat melakukan pemutakhiran data indeks desa sehingga tidak terjadi penurunan status desa. Karena jumlah kuesioner yang banyak

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
			(1879 pertanyaan) memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengisian
4			Pemahaman yang keliru dari pemerintah desa yang tidak mau meningkat status desanya karena takut anggaran Dana Desa Berkurang
5			Pada pelaksanaan update status desa, pemerintah desa terlalu bergantung pada pendamping desa
6	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Perpres no 23 tahun 2021 dan Permendagri 45 tahun 2016	Dukungan anggaran APBD yang kurang untuk pelaksanaan fasilitasi tata wilayah desa
7		Koordinasi antara Dinas PMD Provinsi, Badan Informasi dan Geospasial dengan Dinas PMD Kabupaten selalu intens untuk percepatan kegiatan tata wilayah desa	Hasil pelaksanaan PPBDes harus mendapatkan berita acara verifikasi teknis dari BIG sebagai dasar penyusunan Perbup dan verifikasi yuridis dari Kemenkumham dan Kemendagri yang jadwalnya ditentukan oleh provinsi/ pusat sehingga memperlambat penyusunan perbup
8			Pemerintah Daerah tidak mempunyai tenaga teknis sehingga pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga/ swakelola tipe 2
9	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Dukungan anggaran dari APBD untuk kegiatan fasilitasi penataan kewenangan desa	Belum semua pemerintah desa memahami tentang perdes kewenangan desa dan

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
			implementasinya
10		Perbup 35 tahun 2016 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dantelah ditindaklanjuti oleh 264 desa yang sudah menyusun perdes kewenangan desa	
11	Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa	Dukungan anggaran dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten untuk kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa	Keterbatasan waktu pelaksanaan karenasarpras desa yang bersumber dari BKK baru bisa dilaksanakan setelah PAK
12	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		
13	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**		
14	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	PP no 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	Belum semua kegiatan kerjasama antar desa membentuk BKAD
15		Permendagri no 96 tahun 2017 tentang Tata Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa,	Kurangnya motivasi dari pengelola Bumdesma untuk membentuk unit usaha baru selain DBM
16		Permendesa no 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama	Perlu adanya peningkatan kapasitas untuk direktur unit unit lain

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
17		Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat	Efisiensi biaya operasinal Bumdesma perlu diperhatikan
18		Peraturan Bupati no 4 tahun 2022 tentang Perlindungan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Mlik Desa Bersama	
19		Dukungan anggaran dari APBD untuk kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa	
20		Telah bertransformasinya kegiatan pengelolaan DBM Eks PNPM menjadi Bumdesma Lkd	
21	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Permendagri 96 tahun 2017 tentang Tata Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa	Perjanjian Kerja Sama yang dibuat masih sederhana dan belum menunjukkan menguntungkan bagi pemerintah desa
22		Dukungan anggaran dari APBD untuk kegiatan fasilitasi kerjasama antara desa dengan pihak ketiga	Belum semua desa yang sudah melakukan kerjasama desa dengan pihak ketiga melaporkan kepada Dinas PMD sehingga belum bisa memfasilitasi semua desa dan belum teridentifikasi semua permasalahan

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
23			Perlu adanya pembaharuan dokumen perjanjian kerjasama yang sudah habis masa berlakunya
24	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Permendes PDTT nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan	Setelah pembentukan BKAD dan Bumdesma Kawasan tidak ada pendampingan sehingga tidak ada program kerja
25		Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk 2010-2030	
26		Perbup nomor 11 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Telah ditetapkannya Kawasan Perdesaan dengan SK Bupati Nganjuk Nomor 188/70/K/411.013/2016	Masing-masing desa masih memikirkan ego sektoral masing masing dan belum berfikir secara holistik dan kompherensif untuk bersama2 membangun kawasan perdesaan
27		Adanya dukungan anggaran dari APBD untuk fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Belum dibuat perencanaan pengembangan kawasan yang matang dan belum ada penyertaan modal dari desa untuk pengembangan kawasan perdesaan
28		Telah dibentuk BKAD Kawasan dan Bumdesma Kawasan	Belum aktifnya Bumdesma Kawasan terutama untuk kecamatan Ngetos
29	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
30	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		
31	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.	Aparat Pemerintahan Desa yang kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugas administrasi. Kurangnya memahami prosedur administrasi yang benar,pengelolaan data, atau penggunaan teknologi informasi yang efektif.
32		Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa	
33	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Keterbatasan SDM Perangkat Desa
34		Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa	Tidak tepat waktu dalam tahapan penyusunan produk hukum desa
35		SK Petunjuk Teknis Penyusunan APBDes	
36		Tim Evaluasi dan klarifikasi penyusunan produk hukum desa	
37	Fasilitasi Penyusunan PerencanaanPembangunan Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Keterbatasan kemampuan SDM Perangkat Desa

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
38		Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Keterbatasan tenaga ahli dalam bidang perencanaan
39		Tim Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
40	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Anggaran APBD untuk Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa, Aplikasi SISKEUDES, Peraturan Bupati No 57 jo. Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Kurangnya SDM untuk membina dan melaksanakan pendampingan, monitoring, evaluasi pelaksanaan APB Desa. Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan di Desa yang kurang optimal.
41	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Keterbatasan Kemampuan SDM Perangkat Desa
42		Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Keterbatasan penguasaan teknologi informasi
43		Media Pembelajaran Mandiri Aparatur Pemerintah Desa (Sibermata Desa)	
44		Perangkat Desa Mengikuti Program P3PD dari Kemendagri	
45	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Anggaran APBD untuk Kegiatan Pembinaan BUM Desa, Anggaran Penyertaan Modal dari APB Desa	Tidak adanya regulasi yang mewajibkan BUM Desa memberikan / mengirimkan data laporan pertanggungjawaban BUM Desa
46	Penyelenggaraan Pemilihan,	Tersedianya dukungan anggaran APBD	Adanya Kepala Desa yang bermasalah dengan

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	untuk Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	hukum
47		Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Pelayanan terhadap masyarakat menjadi terhambat
48		Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun	UU Nomor 3 Tahun 2024 belum ditindaklanjutan PP yang mengaturnya
49	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Proses pemberhentian dan pengangkatan terhambat karena UU 3/2024 belum adanya PPnya.
50		Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Belum ada peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024
51	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Proses penyusunan profil desa membutuhkan waktu dan upaya yang cukup. Namun, desa seringkali memiliki jadwal yang padat dengan sumber daya manusia yang terbatas. Keterbatasan waktu dan personel yang tersedia dapat menghambat pelaksanaan yang efektif dari penyusunan profil desa.
52		Evaluasi Kinerja Desa	Keterbatasan data yang dimiliki oleh desa

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
53		Permendagri 12 Tahun 2007	Tidak melakukan upditing profil desa
54	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Anggaran APBD untuk Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset Desa, Aplikasi SIPADES 3.0	Kapasitas SDM Pengelola Aset Desa yang belum kuat.
55	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	SDM Anggota BPD kurang memadahi
56		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Kurangnya koordinasi antara Pemerintahan Desa dan Anggota BPD
57		Perpanjangan masa jabatan anggota BPD dari 6 tahun menjadi 8 tahun	
58		Media pembelajaran mandiri anggota BPD (Sibermata Desa)	
59		Anggota BPD Mengikuti Program P3PD dari Kemendagri	
60	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kurang tertibnya administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa
61			Keterbatasan SDM Pemerintahan Desa
		Permendagri Nomor 46/ 2016	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Anggota BPD

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Keterbatasan Data yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa
		Permendagri 81 tahun 2015	Pemerintahan desa kurang tertib dalam mengupdate Epdeskel
65	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		
66	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
67	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	anggaran pembinaan dari APBD, Perbub 1/2020 tentang LKD sebagai dasar hukum legalitas LKD, Permendagri no 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, SK Bupati Nganjuk	Perlunya sosialisasi posyandu 6 SPM yang ditindaklanjuti dengan pendampingan implementasi posyandu 6 SPM

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Nomor 100.3.3.2/251/K/411.013/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Pos Pelayanan Terpadu	
68	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	anggaran pembinaan dari APBD, Perbub 1/2020 tentang LKD sebagai dasar peningkatan kapasitas	Pemerintah Desa kurang melibatkan LKD sesuai dengan tugas fungsinya, Perlunya Peningkatan Kapasitas bagi LKD
69	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	anggaran pembinaan dari APBD, dukungan pembinaan lintas OPD sesuai tupoksinya	kurangnya usaha ekonomi masyarakat yang terintegrasi dengan BUMDesa
70	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	anggaran pembinaan dari APBD, anggaran dari APBDes	Pemerintah desa belum menjadikan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagai prioritas pembangunan di desa
71	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	anggaran pembinaan dari APBD	Semakin lunturnya nilai gotong royong masyarakat, pemdes kurang aktif melaporkan kegiatan Gotong royong
72	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	Perpres 99/2017 dan Permendagri 36/2020 yang mengatur tentang PKK, anggaran	TP PKK Desa masih banyak yang tidak aktif, hanya menjadikan kegiatan PKK sebagai

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	fasilitasi pembinaan dari APBD dan APBDesa, dukungan Pengurus TPPKK Kabupaten yang aktif	formalitas, banyak yang tidak membuat laporan tahunan PKK Sinergi TP PKK kabupaten dengan Perangkat daerah masih kurang

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Laporan Capaian Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 disusun sebagai bentukpertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2025 yang merupakan penjabaran Renstra DPMD tahun 2025 – 2029. Laporan dimaksud memuat informasi tentang Pencapaian Rencana Kerja Tahun 2025 dan progress capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 yang implementasinya tertuang dalam RKA-K/L, serta permasalahan dan upaya penyelesiannya.

Penyusunan Laporan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini diucapkan banyak terima kasih, semoga dapat bermanfaat dan digunakan sesuai tujuan penyusunannnya.

IV.2. Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatenNganjuk tahun 2025 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai, ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan renja sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan renjamaka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan sub kegiatan dengan prioritas yang kecuali dalam mendukung IKU maupun IKI.

Untuk pelaksanaan renja diperlukan beberapa kaidah yaitu seluruh unsur perangkat Daerah dan stakeholder terkait harus melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dengan sebaik – baiknya. Setiap unsur perangkat Daerah senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan diperlukan juga koordinasi yang baik antar unsur Perangkat daerah (bersinergi dan kolaborasi untuk menyukseskan pelaksanaan renja tahun berikutnya).

Rencana Tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
2. Memperkuat koordinasi sehingga tercipta sinergi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder Dinas PMD
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjung lapang, pembuatan laporan rakor berkala, pendampingan teknis dan fasilitas lain terutama terhadap jajaran Pemerintahan Desa yang merupakan wilayah binaan Dinas PMD.

4. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur Kegiatan.

5. Memberikan reward dan punishmen sesuai dengan performasi masing – masing.

Nganjuk, 6 Oktober 2025
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Nganjuk



Dr. SOFINGI, A.P, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001

FORMULIR E 81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I			II			III			IV										
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kemandirian Desa																																Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	78,5	Nilai	23.081.208.000	71,7	Nilai	5.451.070.674	**80**	**Nilai**	**6.227.402.191**		**Nilai**	**606.816.974**			**2.060.301.388**			**1.254.910.212**						**Nilai**	3.922.028.574	71,7	**Nilai**	9.373.099.248	91,34	40,61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun	43	dokumen	126.000.000	10	dokumen	30.119.680	**14**	**dokumen**	**39.307.200**	7	**dokumen**	**27.827.250**	3	**dokumen**	**10.467.000**	0	**dokumen**	**0**				10	**dokumen**	38.294.250	20	**dokumen**	68.413.930	46,51	54,30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42	Laporan	126.000.000	9	Laporan	30.119.680	14	Laporan	39.307.200	7	Laporan	27.827.250	3	Laporan	10.467.000	0	Laporan	0				10	Laporan	38.294.250	19	Laporan	68.413.930	45,24	54,30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	288	dokumen	18.316.608.000	96	dokumen	4.074.169.125	**105**	**dokumen**	**5.147.201.059**	9	**dokumen**	**463.146.691**	24	**dokumen**	**1.793.245.612**			**974.109.965**				33	**dokumen**	3.230.502.268	71,7	**dokumen**	7.304.671.393	24,90	39,88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	orang/bulan	18.262.608.000	108	orang/bu	4.054.584.885	31	orang/bulan	5.134.488.059	31	orang/ bulan	462.426.691	31	orang/ bulan	1.787.075.612	31	orang/ bulan	968.516.965				93	orang/bulan	3.218.019.268	201	orang/bulan	7.272.604.153	591,18	39,82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	24.000.000	2	Laporan	4.629.920	2	Laporan	5.691.000	2	Laporan	720.000	0	Laporan	0	0	Laporan	4.873.000				2	Laporan	5.593.000	4	Laporan	10.222.920	66,67	42,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ semesteran SKPD	204	Laporan	30.000.000	68	Laporan	14.954.320	72	Laporan	7.022.000	9	Laporan	-	21	Laporan	6.170.000	19	Laporan	720.000				49	Laporan	6.890.000	117	Laporan	21.844.320	57,35	72,81	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	3612	dokumen	1.251.000.000	3602	dokumen	494.926.307	**3,62**	**dokumen**	**379.620.800**		**dokumen**	**21.706.324**			**54.108.386**	**2697**	**dokumen**	**130.772.055**				**2697**	**dokumen**	206.586.765	71,7	**dokumen**	701.513.072	1,99	56,08	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan	3	Paket	30.000.000	1	Paket	12.004.200	1	Paket	9.998.900	0	Paket	6.691.500	1	Paket	1.206.500	0	Paket	2.025.000				1	Paket	9.923.000	2	Paket	21.927.200	66,67	73,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan	24	Paket	330.000.000	8	Paket	74.667.898	8	Paket	57.975.400	2	Paket	9.651.220	2	Paket	18.040.531	2	Paket	10.391.955				6	Paket	38.083.706	14	Paket	112.751.604	58,33	34,17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan penggandaan yang di sediakan	6	Paket	21.000.000	2	Paket	3.049.170	2	Paket	2.152.500	0	Paket	-	2	Paket	1.972.000	0	Paket	-				2	Paket	1.972.000	4	Paket	5.021.170	66,67	23,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan perundang undangan yang disediakan	3	dokumen	12.000.000	1	dokumen	2.160.000	12	dokumen	3.000.000	3	dokumen	360.000	3	Dokumen	540.000	3	Dokumen	540.000				9	dokumen	1.440.000	10	dokumen	3.600.000	333,33	30,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan penyelenggaraan rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1800	Laporan	780.000.000	584	Laporan	377.829.691	550	Laporan	277.928.000	1	Laporan	376.000	48	Laporan	24.311.500	229	Laporan	115.665.100				278	Laporan	140.352.600	862	Laporan	518.182.291	47,89	66,43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penata usahan arsip dinamis pada SKPD	9000	dokumen	78.000.000	3000	dokumen	25.215.348	3000	dokumen	28.566.000	701	dokumen	4.627.604	1000	dokumen	8.037.855	700	dokumen	2.150.000				2401	dokumen	14.815.459	5401	dokumen	40.030.807	60,01	51,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Pada yang di sediakan	223	unit	597.100.000	67	unit	238.291.000	**6**	**unit**	**61.630.308**	0	**unit**	-	4	**unit**	**30.003.300**	0	**Unit**	**29.875.650**				**4**	**unit**	59.878.950	71	**unit**	298.169.950	31,84	49,94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	159	Unit	122.000.000	52	Unit	55.386.000	0	Unit	-		Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	0				0	Unit	-	52	Unit	55.386.000	32,70	45,40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesinLainnya yang di sediakan	47	Unit	475.100.000	15	Unit	182.905.000	4	Unit	61.630.308	0	Unit	-	4	Unit	30.003.300	0	Unit	29.875.650				4	Unit	59.878.950	19	Unit	242.783.950	40,43	51,10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150	Laporan	395.500.000	26	Laporan	83.195.484	**50**	**Laporan**	**88.276.000**	7	**Laporan**	**14.934.603**	7	**Laporan**	**20.915.455**	6	**Laporan**	**18.349.848**				**20**	**Laporan**	54.199.906	46	**Laporan**	137.395.390	30,67	34,74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.08.0001	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	6	Laporan	75.500.000	2	Laporan	23.296.348	2	Laporan	26.276.000	1	Laporan	4.377.603	1	Laporan	6.527.855	0	Laporan	6.168.404				2	Laporan	17.073.862	4	Laporan	40.370.210	66,67	53,47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.08.0002	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Air dan Listrik yang disediakan	144	Laporan	320.000.000	24	Laporan	59.899.136	24	Laporan	62.000.000	6	Laporan	10.557.000	6	Laporan	14.387.600	6	Laporan	12.181.444				18	Laporan	37.126.044	42	Laporan	97.025.180	29,17	30,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang di sediakan	382	Unit	2.395.000.000	85	Unit	530.369.078	**69**	**Unit**	**511.366.824**	7	**Unit**	**79.202.106**	39	**Unit**	**151.561.635**	12	**Unit**	**101.802.694**				**58**	**Unit**	332.566.435	143	**Unit**	862.935.513	37,43	36,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara yang di bayarkan Pajaknya.	36	Unit	960.000.000	23	Unit	336.459.706	7	Unit	295.862.443	2	Unit	32.107.300	2	Unit	71.603.825	2	Unit	79.105.894				6	Unit	182.817.019	29	Unit	519.276.725	80,56	54,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang di pelihara	97	Unit	35.000.000	20	Unit	3.243.000	20	Unit	3.302.754	0	Unit	-	20	Unit	3.270.750	0	Unit	-				20	Unit	3.270.750	40	Unit	6.513.750	41,24	18,61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang	67	Unit	150.000.000	40	Unit	38.228.703	40	Unit	38.850.000	5	Unit	-	15	Unit	16.845.000	10	Unit	9.260.000				30	Unit	26.105.000	70	Unit	64.333.703	104,48	42,89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan banguan gedung kantor lainnya yang di pelihara/ rehabilitasi	2	Unit	1.250.000.000	2	Unit	152.437.669	2	Unit	173.351.627	0	Unit	47.094.806	2	Unit	59.842.060	0	Unit	13.436.800				2	Unit	120.373.666	4	Unit	272.811.335	200,00	21,82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	Persentase Desa Dengan Penataan Sesuai Stardar Ketentuan	25	persen	900.000.000	27	persen	135.626.498	**25**	**persen**	**63.964.100**	0	**persen**	-	**11,4**	**persen**	**440.000**			**33.400.400**				**11,4**	**persen**	33.840.400	38,4	**persen**	169.466.898	153,60	18,83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa	189	Desa	900.000.000	63	Desa	135.626.498	**66**	**Desa**	**63.964.100**	0	**Desa**	-	**27**	**Desa**	**440.000**			**33.400.400**				**27**	**Desa**	33.840.400	90	**Desa**	169.466.898	47,62	18,83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.02.2.01.0001	Pembentukkan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5	Desa	20.000.000	0	Desa	-	1	Desa	11.017.650	0	Desa	-	0	Desa	-			10.905.800				0	Desa	10.905.800	0	Desa	10.905.800	0,00	54,53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Penataan Wilayah	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	45	Desa	585.000.000	20	Desa	81.556.798	30	Desa	30.685.000	0	Desa	-	0	Desa	440.000			11.684.800				0	Desa	12.124.800	20	Desa	93.681.598	44,44	16,01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	60	Desa	90.000.000	30	Desa	12.397.000	25	Desa	7.779.200	0	Desa	-	27	Desa	-			5.884.800				27	Desa	5.884.800	57	Desa	18.281.800	95,00	20,31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa	Jumlah sarana dan Pra Sarana Desa	60	Unit	225.000.000	23	Unit	41.672.700	10	Unit	14.482.250	0	Unit	-	0	Unit	-			4.925.000				0	Unit	4.925.000	23	Unit	46.597.700	38,33	20,71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.03.	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Persentase Desa Dengan Pelaksanaan Kerja sama Secara Aktif	87	persen	627.000.000	70	persen	150.267.796	**87%**	**persen**	**121.864.950**		**persen**	**12.055.200**	**8**	**persen**	**32.398.884**	**16**	**persen**	**30.692.076**				**24**	**persen**	75.146.160	94	**persen**	225.413.956	108,05	35,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dan Pembangunan	230	Desa	627.000.000	230	Desa	150.267.796	**230**	**Desa**	**121.864.950**		**Desa**	12.055.200	4	Dokumen	**32.398.884**	41	desa	**30.692.076**				**45**	**Desa**	75.146.160	275	**Desa**	225.413.956	119,57	35,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.03.2.01. 0001	Fasilitasi Kerjasama Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	60	dokumen	426.000.000	20	dokumen	101.457.514	10	dokumen	84.693.850	6	dokumen	7.940.588	2	Dokumen	26.358.044	2	dokumen	20.817.876				10	dokumen	55.116.508	30	dokumen	156.574.022	50,00	36,75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.03.2.01. 0002	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kerja sama antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	60	dokumen	50.000.000	20	dokumen	6.113.300	15	dokumen	5.047.750	0	dokumen	-	2	Dokumen	-	7	dokumen	3.955.800				9	dokumen	3.955.800	29	dokumen	10.069.100	48,33	20,14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.03.2.01. 0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	9	dokumen	151.000.000	3	dokumen	42.696.982	2	dokumen	32.123.350	0	dokumen	4.114.612	0	Dokumen	6.040.840	1	dokumen	5.918.400				1	dokumen	16.073.852	4	dokumen	58.770.834	44,44	38,92	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Yang telah Menyelenggarakan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa sesuai Standar	100	persen	13.521.000.000	38	persen	5.365.595.355	**100**	**persen**	**3.318.503.825**		**persen**	607.667.840		**persen**	**1.120.513.442,00**		**persen**	**859.124.860,00**				0	**persen**	2.587.306.142	38	**persen**	7.952.901.497	38,00	58,82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa	264	Desa	13.521.000.000	263	Desa	5.365.595.355	**264**	**Desa**	**3.318.503.825**		**Desa**	607.667.840		**Desa**	1.120.513.442,00		**Desa**	**859.124.860,00**				0	**Desa**	2.587.306.142	263	**Desa**	7.952.901.497	99,62	58,82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01. 0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	15	dokumen	61.000.000	5	dokumen	9.997.000	4	dokumen	8.201.900	0	dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	4.276.900				0	dokumen	4.276.900	5	dokumen	14.273.900	33,33	23,40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01. 0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa.	528	dokumen	240.000.000	528	dokumen	89.676.356	528	dokumen	59.168.500	0	dokumen	-	0	Dokumen	-	264	Dokumen	5.000.000				264	dokumen	5.000.000	792	dokumen	94.676.356	150,00	39,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01. 0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.	264	dokumen	175.000.000	264	dokumen	36.901.000	264	dokumen	25.273.500	0	dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	2.500.000				0	dokumen	2.500.000	264	dokumen	39.401.000	100,00	22,51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01. 0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penggelolaan Keuangan Desa	264	dokumen	10.500.000.000	263	dokumen	4.790.569.434	264	dokumen	2.907.391.775	0	dokumen	574.010.340	0	Dokumen	1.104.719.342	196	Dokumen	756.850.460				196	dokumen	2.435.580.142	459	dokumen	7.226.149.576	173,86	68,82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01. 0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	280	Orang	190.000.000	80	Orang	144.708.000	100	Orang	8.400.500	0	Orang	-	0	Orang	975.000	100	Orang	975.000				100	Orang	1.950.000	180	Orang	146.658.000	64,29	77,19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01. 0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa	20	dokumen	555.000.000	20	dokumen	58.874.055	80	dokumen	39.704.750	0	dokumen	33.657.500	0	dokumen	-	0	dokumen	200.000				0	dokumen	33.857.500	20	dokumen	92.731.555	100,00	16,71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01. 0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	Laporan	810.000.000	1	Laporan	101.671.000	1	Laporan	167.358.500	0	Laporan	-	0	Laporan	7.748.100	0	Laporan	47.832.500				0	Laporan	55.580.600	1	Laporan	157.251.600	100,00	19,41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01. 0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3	Laporan	150.000.000	1	Laporan	5.290.000	1	Laporan	7.279.400	0	Laporan	-	0	Laporan	1.700.000	0	Laporan	4.191.000				0	Laporan	5.891.000	1	Laporan	11.181.000	33,33	7,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01. 0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	264	dokumen	120.000.000	264	dokumen	20.590.062	264	dokumen	9.056.000	0	dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	5.106.000				0	dokumen	5.106.000	264	dokumen	25.696.062	100,00	21,41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01. 0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	20	dokumen	120.000.000	20	dokumen	39.266.448	264	dokumen	29.362.200	0	dokumen	-	0	Dokumen	1.503.000	0	Dokumen	19.318.000				0	dokumen	20.821.000	20	dokumen	60.087.448	100,00	50,07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01. 0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Kapasitas	80	Orang	120.000.000	80	Orang	19.529.500	100	Orang	6.078.800	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	975.000				0	Orang	975.000	80	Orang	20.504.500	100,00	17,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	6	Laporan	240.000.000	3	Laporan	19.772.500	2	Laporan	7.618.000	1	Laporan	-	1	Laporan	3.868.000	0	Laporan	3.700.000				2	Laporan	7.568.000	5	Laporan	27.340.500	83,33	11,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	JumlaH dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa	21	dokumen	240.000.000	21	dokumen	28.750.000	21	dokumen	43.610.000	0	dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	8.200.000				0	dokumen	8.200.000	21	dokumen	36.950.000	100,00	15,40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembaannya diberdayakan	57	persen	2.222.000.000	28	persen	752.017.036	**45**	**persen**	**614.644.600**		**persen**	**6.855.200**	**0**	**persen**	**201.335.704**	**0**	**persen**	**126.529.324**				**0**	**persen**	334.720.228	28	**persen**	1.086.737.264	49,12	48,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan	264	Desa	2.222.000.000	80	Desa	752.017.036	**118**	**Desa**	**614.644.600**		**Desa**	6.855.200		**Desa**	201.335.704	41	**Desa**	**126.529.324**				**41**	**Desa**	334.720.228	121	**Desa**	1.086.737.264	45,83	48,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan masyarakat Hukum adat	720	dokumen	195.000.000	240	dokumen	14.482.000	300	dokumen	76.049.450	0	dokumen	-	52	Dokumen	15.647.500	101	Dokumen	35.450.000				153	dokumen	51.097.500	393	dokumen	65.579.500	54,58	33,63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Bagian	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDa/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12			13			14=7+10			15=14/8		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Taruna), Lembaga LPM, dan Karang LPM, dan Karang Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	720	Lembaga	270.000.000	315	Lembaga	105.734.000	384	Lembaga	64.214.150	0	Lembaga -	234	Lembaga 33.680.000	0	Lembaga 575.000				234	Lembaga	34.255.000	569	Lembaga	139.989.000	79,03	51,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekomoni Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatana Asli Desa	60	dokumen	107.000.000	21	dokumen	39.503.000	2	dokumen	14.842.800	0	dokumen -	0	Dokumen 707.000	0	Dokumen 900.000				0	dokumen	1.607.000	21	dokumen	41.110.000	35,00	38,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfataan teknologi Tepat Guna	60	Laporan	45.000.000	20	Laporan	84.586.000	2	Laporan	62.784.000	0	Laporan -	1	Laporan 46.384.000	0	Laporan -				1	Laporan	46.384.000	21	Laporan	130.970.000	35,00	291,04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan hasil fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	60	Laporan	105.000.000	20	Laporan	94.490.000	1	Laporan	20.102.700	0	Laporan -	0	Laporan 12.563.000	0	Laporan 6.000.000				0	Laporan	18.563.000	20	Laporan	113.053.000	33,33	137,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga PKK	305	dokumen	1.500.000.000	305	dokumen	413.222.036	110	dokumen	367.651.500	20	dokumen 6.855.200	22	Dokumen 92.354.204	42	Dokumen 83.604.324				84	dokumen	182.813.728	389	dokumen	596.035.764	127,34	39,74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											10.346.379.666		1.283.195.214		3.414.989.418		2.304.656.872						6.953.041.304						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
																									Rata-rata capaian kinerja			89,18	44,13	
																									Predikat			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Nganjuk, 6 Oktober 2025

KEPALA DINAS PMD

KABUPATEN NGANJUK

Dr. SOFYAN, S.Sos, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19640321 198503 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DPMD